

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdhatul Ulama merupakan salah satu Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Organisasi Nahdhatul Ulama pengurus dan anggotanya hampir rata-rata para Ulama dikarenakan NU sebagai organisasi yang berbasis keagamaan. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Kampung Kertopaten, Surabaya, di rumah K.H Wahab Hasbulloh¹ dibawah pimpinan K.H Hasyim Asy'ari.² Pada hakikatnya dalam ajaran dan pemahaman kultur Nahdhatul Ulama telah berkembang sejak lama di Indonesia, bisa dikatakan meneruskan ajaran-ajaran Walisongo. Para Ulama membentuk, mempertahankan Islam Tradisional dengan berdirinya NU sebagai representasi Islam versi Indonesia dan juga melestarikan tradisi-tradisi keislaman khas Nusantara yang telah dirumuskan seperti *Manhajul Fikr* yang *Tawassuth* (jalan tengah), *I'tidal* (tegak lurus), *Tasamuh* (toleransi), *Tawazun* (seimbang), *Bahstul Masail*, silaturahmi, membahas kajian-kajian kitab kuning di pondok pesantren ataupun masjid dan

¹ M. Mansyur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta; Al-Amin Press, 1996), p. 52

² Fathoni Ahmad, "Sejarah Singkat Berdirinya Nahdhatul Ulama," <https://www.nu.or.id/post/read/116035/sejarah-singkat-berdirinya-nahdhatul-ulama>, diakses pada Sabtu 29 Mei 2021 pukul 03:10

mengimplementasikan nilai-nilai lokal yang non-Islam dijadikan nilai-nilai Islami.³

Pada awal didirikannya Nahdhatul Ulama bukan bertujuan politik kekuasaan, akan tetapi dalam bidang keagamaan dan kerakyatan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Maka, bagi ummat Islam Indonesia yang menginginkan pelaksanaan praktik dan pemikiran keagamaannya dengan basis tradisi lokal yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia, berdirinya NU dinilai sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan tradisi lokal yang memiliki nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini bisa dikatakan dengan politik kerakyatan dalam pengertian yang lebih luas, maka politik kerakyatan merupakan sebagai tingkatan politik tertinggi yang diraih oleh Nahdhatul Ulama.⁴

Adapun politik kekuasaan dalam perjalanan Nahdhatul Ulama berkiprah dan berkontribusi dalam bidang politik di Indonesia, bermula dari MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) bersama dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Sarekat Islam (SI) dari mengikuti MIAI, Nahdhatul Ulama terlibat dalam permasalahan-permasalahan politik yang terjadi. Namun eksistensi dari MIAI sendiri kurang terlihat oleh publik, sehingga tidak berlangsung lama, akhirnya MIAI membubarkan diri pada bulan Oktober tahun 1943 M dan digantikan oleh Masyumi (Majlis Syuro

³ Nurlira Goncing, "Politik Nahdhatul Ulama dan Orde Baru," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2015), p. 62-63

⁴ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili, "*Nahdhatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*", (Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2010), p. 4

Muslimin Indonesia).⁵ Keluarnya maklumat dari pemerintah Indonesia pada tanggal 03 November 1945 untuk mendirikan partai politik, Masyumi yang merupakan pergantian dari MIAI bergegas melakukan muktamar dan menyetujui bahwasannya Masyumi resmi menjadi partai politik pada tanggal 08 November 1945 lahir dari rahim proklamasi Indonesia, Nahdhatul Ulama hanya sebagai pendukung yang mengikuti kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh Masyumi.

Nahdhatul Ulama keluar dari partai Masyumi pada tahun 1952 M disebabkan kurangnya akomodasi kepentingan dan keinginan NU oleh Masyumi. Hal ini bisa dilihat dari dua hal *Pertama* rasa tidak nyaman dalam Masyumi setelah terjadinya muktamar ke IV di Yogyakarta menghasilkan perubahan yang tidak signifikan dengan berubahnya status Majelis Syuro menjadi Badan Penasehat, NU merasa kedudukannya sudah tidak dipentingkan dan patut untuk dipertimbangkan kembali oleh NU sendiri dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan Masyumi, *Kedua* tidak terpenuhinya keinginan NU untuk mendapatkan jabatan sebagai Menteri Agama. Dua hal ini sebagai pemicu awal untuk keluarnya NU dari Masyumi dan membuat NU merasa sangat kecewa terhadap Masyumi, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengadakan rapat besar pada tanggal 5 April 1952 M di Surabaya dan memutuskan untuk mengeluarkan NU dari Masyumi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politik.

⁵ <https://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik>

Kemudian hasil dari rapat PBNU ini diperkuat dengan melakukan muktamar ke-19 di Palembang pada 28 April - 1 Mei 1952.⁶ Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara dengan hasil suara 61 suara setuju, 9 suara menolak, dan 7 abstain atau tidak sah dalam pengambilan hak suara.⁷ Berdasarkan hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan dengan suara terbanyak 61 setuju dengan keluarnya NU dari Masyumi. Akhirnya NU menyatakan sikap secara resmi memisahkan diri dari Masyumi pada muktamar ke-19 di Palembang.

Setelah memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 NU memutuskan untuk menjadi partai politik secara sah dan mengikuti pemilu pertama pada tahun 1955, NU mengukir sejarah dalam kancah politik nasional, berhasil memungut suara yang besar dan mendapatkan 45 kursi di parlemen. Dengan peluang ini, NU semakin jauh memasuki ranah perpolitikan di Indonesia dan tidak hanya menjadi ormas Islam saja akan tetapi menjadi organisasi politik atau partai politik yang besar.

Tujuan politik NU ketika menjadi parpol adalah *Pertama*, penyaluran dana industri terhadap NU untuk meningkatkan fasilitas terhadap pendidikan dan keagamaan, seperti pondok pesantren, masjid dan juga prasarana sosial, seperti membangun puskesmas, panti asuhan dan lain sebagainya. *Kedua*, berusaha

⁶ Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)," *THAQAFIYYAT: Universitas Negeri Semarang*, Vol. 14, No. 1, (2013), p. 95-96

⁷ Katjung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, (Surabaya; Erlangga, 1992), p. 62-63

mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah Republik Indonesia bagi Nahdhatul Ulama. Peluang semacam ini guna mendapatkan keuntungan langsung untuk masyarakat NU semakin sejahtera dan meningkatkan dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim, seperti membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan mendukung dalam upaya peningkatan pendidikan Islam. *Ketiga*, mendapatkan kedudukan jabatan birokrasi. Birokrasi dipandang sebagai sebagai jalan mobilitas dan status sosial.masuknya muslim tradisonal pada jajaran birokrasi diyakini akan meningkatkan kedudukan NU di masyarakat Indonesia dan memperkuat suara umat dikalangan pemerintah Republik Indonesia.⁸

Praktik politik pada umumnya teridentifikasi dengan adanya perebutan kekuasaan dengan meraih kursi di parlemen sebanyak-banyaknya, menjadi partai yang besar untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi. Namun berbeda halnya dengan Nahdhatul Ulama yang menerapkan sistem politik praktis, lebih banyak mewujudkan kepentingan Bangsa dan Negara, berupaya memformulasikan Islam ke dalam sistem Negara, mengarahkan perjuangannya untuk memperkuat aqidah *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah* (ASWAJA) yang merupakan tujuan awal berdirinya NU, menjadi basis kekuatan terhadap perlawanan kolonialisme dengan membentuk beberapa organisasi masyarakat yang dilindungi oleh Nahdhatul Ulama seperti Banser (Barisan Ansor Serba Guna), Lesbumi

⁸ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta; LKIS, 2011), p. 165.

(Lemaga Seni Budaya Muslim), Pertanu (Persatuan Tani NU). Nahdhatul Ulama juga menuntut kepada pemerintah Indonesia dalam pembubaran PKI pada tanggal 5 Oktober 1965 dan memberikan pengarahannya kepada masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan bangsa dengan kultur yang telah dilaksanakan sejak awal berdirinya NU.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk membahas perubahan yang dialami oleh Nahdhatul Ulama menjadi Partai Politik dengan judul **“TRANSFORMASI ORMAS NAHDHATUL ULAMA MENJADI PARTAI POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1952-1984”**. Alasan penulis mengambil pembahasan ini karena tertarik dengan sejarah politik di Indonesia yang belum sepenuhnya terungkap, karena persatuan ormas dan ormas merubah bentuknya menjadi partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai pembahasan pokok, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Nahdhatul Ulama Sebelum Tahun 1952?
2. Bagaimana Gejolak Politik Nahdhatul Ulama tahun 1952?

⁹ Nurlila Goncing, “Politik Nahdhatul Ulama dan Orde Baru,” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2015), p. 68-69

3. Bagaimana Transformasi Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini terarah pada terwujudnya hasil penelitian yang menjelaskan tentang :

1. Kondisi Nahdhatul Ulama Sebelum Tahun 1952
2. Faktor Transformasi Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik
3. Transformasi Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik Di Indonesia

D. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian yang berjudul Transformasi ORMAS Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik Di Indonesia Tahun 1952-1984. Mengambil informasi dari buku-buku Nahdhatul Ulama seperti :

Buku “NU Vis-à-vis Negara” yang ditulis oleh Andree Feillard, penerbit BasaBasi; Yogyakarta tahun 2017. Didalam bukunya membahas komitmen para kaum tradisional (Nahdhatul Ulama) terhadap nilai-nilai kebangsaan, keterbukaan terhadap pembaharuan sosial dan pendidikan dan memperdalam dialog dengan kebudayaan lokal.

Buku “Khazanah Aswaja” yang ditulis oleh Abdurrahman Navis, dkk, penerbit Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur; Surabaya tahun 2016. Didalam

bukunya mengulas seluruh aspek Aswaja (Sejarah, Akidah, Fikih, Tasawuf dan Implementasinya) secara konkrit di tengah merebaknya agitasi doktrin-doktrin radikal dan liberal.

Buku “Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik” yang ditulis oleh M. Ali Haidar, penerbit Al-Maktabah; Sidoarjo tahun 2011. Didalam bukunya menjelaskan latarbelakang dan perkembangan historis serta pergulatann internal Nahdhatul Ulama dan peran Ulama didalamnya. Selain itu juga membahas hubungan Nahdhatul Ulama dengan organisasi Islam, latarbelakang Nahdhatul Ulama keluar dari Masyumi dan perkembangan Nahdhatul Ulama dalam pergulatan dipentas politik dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih.

Buku “Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967” yang ditulis oleh Greg Fealy, penerbit LKIS; Yogyakarta tahun 2003. Didalam bukunya menjelaskan tindakan Nahdhatul Ulama dalam berpolitik yang selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang meletakkan prioritas tinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya.

Buku “Nahdhatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan” yang ditulis oleh Khmami Zada dan A. Fawaid Sjadzili, penerbit PT Kompas Media Nusantara; Jakarta tahun 2010. Didalam bukunya membahas dinamika yang dialami nahdhatul ulama sejak berdirinya pada tahun 1926. Nahdhatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tetap konsisiten mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dengan mendefinisikan Islam dalam

konteks kebangsaan sesuai dengan paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menelusuri beberapa fakta lapangan yang valid terkait kondisi, latar belakang, peran, objek, dan pelaku, serta peristiwa yang terjadi sebenarnya, maka penulis mengambil langkah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis (sejarah) suatu usaha untuk menyelidiki fakta data lapangan dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran dan melalui pemikiran yang kritis sesuai prosedur penelitian. Melalui pendekatan sejarah seseorang akan diajak memasuki keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu peristiwa.¹⁰

Untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan multidimensional yaitu model pendekatan yang tidak menggunakan satu teori saja, akan tetapi menggunakan beberapa teori untuk melakukan penelitian seperti ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, psikologi dan ilmu politik.¹¹ Penulis mengharapkan dengan digunakannya pendekatan multidimensional dapat mengetahui

¹⁰ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta; Gramedia, 1992), p. 77

¹¹ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta; Ombak, 2012), p. 48

pemahaman yang sangat luas secara objektif dan utuh tentang peristiwa yang telah terjadi.

Membicarakan suatu keadaan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan sosial yang mana akan berkesinambungan terhadap masyarakat, gejala sosial, faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan serta kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam sebuah proses terjadinya sebuah peristiwa. Untuk memperdalam kajian teoritis dalam penelitian tentang dinamika suatu perubahan, maka penulis menggunakan pendekatan historis-sosial yang memberikan sebuah pemahaman tentang sebuah hubungan terhadap pelaku sejarah dengan peristiwa.

Teori transformasi merupakan konsep ilmiah atau sebuah alat untuk mendapatkan suatu analisis, karena dengan memahami sebuah perubahan yang terjadi memberikan dua aspek keadaan yang berbeda yakni sebelum dan sesudah terjadinya sebuah peristiwa. Dua keadaan ini yang perlu dikaji oleh penulis sebagai bahan kajian untuk mendapatkan sebuah titik terang dalam terjadinya sebuah transformasi yang dilakukan secara terstruktur. Transformasi juga merupakan suatu perpindahan sesuatu hal ke arah yang lain tanpa merubah struktur sama sekali yang terkandung didalamnya meskipun dalam pembentukannya telah berubah. Transformasi melibatkan jaringan sosial dan ekologis. Apabila jaringan tersebut dirubah, maka akan terdapat sebuah transformasi lembaga sosial, nilai-nilai

dan pemikirannya.¹² Berdasarkan teori transformasi tersebut dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwasannya transformasi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyebabkan sebuah perubahan pada satu objek yang telah ada sebelumnya.

Organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama dan memiliki sifat strukturyang baik, biasanya dimulai dari tingkatan Pengurus Pusat (PP) mencakup nasional, Pengurus Wilayah (PW) mencakup provinsi, Pengurus Cabang (PC) mencakup kabupaten dan kota, Pengurus Anak Cabang (PAC) mencakup kecamatan dan Pengurus Ranting (PR) mencakup kelurahan. Organisasi kemasyarakatan secara umum menjadi dua bagian; Pertama, organisasi yang bergerak pada satu bidang secara khusus, biasanya organisasi kemasyarakatan yang pertama diisi dengan profesi seperti, Dokter dengan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nelayan dengan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Persatuan Sarjana Hukum (APHI) dan lain sebagainya. Kedua, organisasi kemasyarakatan yang bergerak diberbagai bidang dari satu kekhususan seperti, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Persis, HKBP dan lain sebagainya, karena dalam praktiknya selain organisasi berbasis agama juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan, seperti pendidikan, kesehatan, sarpras, dan lain sebagainya.

¹² Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2006), p. 26

Asal usul berdirinya partai politik, karena tiga teori, *Pertama*, teori kelembagaan yang hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat munculnya partai politik sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai upaya pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.¹³

Tiga teori diatas ada pada Indonesia pasca kemerdekaan yang membutuhkan partai-partai politik sebagai upaya pembangunan bangsa Indonesia. Dalam keadaan pasca kemerdekaan Indonesia tidak sedikit organisasi kemasyarakatan mengambil kesempatan untuk menjadi partai politik, seperti Masyumi, Nahdhatul Ulama, Parmusi, PKI dan lain sebagainya. Organisasi kemasyarakatan yang tidak menjadi partai politik menginduk ke dalam partai politik sesuai dengan ideologi dan tujuan organisasi itu sendiri. Nahdhatul Ulama pada awalnya belum menjadi partai politik dan masih menginduk kepada Masyumi sebagai partai politik dan NU menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang dibuat Masyumi. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama terhadap Masyumi, NU merasa dirugikan, karena pada dasarnya Nahdhatul Ulama memiliki dukungan dan suara banyak. Maka dari itu Nahdhatul Ulama menjadi partai politik.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 1992), p. 113.

Partai politik mempunyai posisi dan peran penting dalam demokrasi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi banyak juga orang-orang berpandangan bahwa partai politik sebuah kendaraan untuk mencapai tujuannya sendiri dan menguasai negara. Partai politik juga mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dalam sebuah kelompok dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan partai politik.¹⁴ Berbeda dengan Nahdhatul Ulama yang melakukan transformasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik guna kemaslahatan ummat yang pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, maka dari itu Nahdhatul Ulama muncul sebagai wadah masyarakat dan menjadikan suatu penghubung dengan pemerintah. Kemudian tidak sedikit kader Nahdhatul Ulama menilai bahwasannya NU menjadi partai politik tahun 1952 semakin berkurang dalam menjalankan nilai-nilai dan tujuan awal didirikannya NU, karena beberapa masyarakat NU lebih mementingkan dirinya sendiri dalam jabatan.

Nahdhatul Ulama adalah suatu organisasi masyarakat yang berbasis agama yang menjalankan dan menjunjung tinggi sistem tradisional seperti mendirikan pondok pesantren, berdakwah menggunakan nilai-nilai masyarakat lokal yang telah ada pada masa walisongo. Nahdhatul Ulama menjadi partai politik pada tahun

¹⁴ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia, 2000), p. 160.

1952 dan mengikuti pemilu pada tahun 1955 dan menggabungkan diri kepada PPP pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan orde baru. NU terjun kepada politik praktis juga menuai kontroversi dari para kader yang telah keluar jalur dari tujuan awal berdirinya NU, seruan-seruan yang dilontarkan oleh para kader yang kontra terhadap Nahdhatul Ulama menjadi partai politik untuk kembali kepada khittah NU 1926 ini pada tahun 1971 diabaikan begitu saja dan diserukan kembali pada tahun 1979. Akhirnya NU berhenti menjalankan politik praktis dan kembali kepada khittah NU 1926 pada tahun 1984. Akan tetapi NU masih menjalankan politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatan dan politik yang penuh dengan etika dikarenakan beberapa faktor; *Pertama*, para elite NU suka dalam menjalankan politik praktis, tidak lepas dari sejarah bahwasannya NU sendiri dilahirkan tidak lepas dari peran politik kekuasaan, apabila NU dipisahkan dari politik sama saja dengan memisahkan NU dengan jejak historisnya. *Kedua*, NU merupakan satu-satunya organisasi yang berbasis agama terbesar di Indonesia yang menjadikan NU memiliki daya tarik tersendiri terhadap pihak politis. *Ketiga*, NU kultural harus memiliki jaur politik secara resmi untuk kemandirian politik warga NU sendiri yang pada umumnya masyarakat NU tidak serta merta percaya diri dengan mengambil sebuah keputusan politik secara otonom. *Keempat*, jika Khittah NU dipahami sebagai ketidaktahuan NU secara struktural terhadap politik masing-masing warganya, maka NU akan mengalami kerugian, karena kekuatan NU akan

tersebar di berbagai partai yang mengalami tercerai berai dan menjadi kecil.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ilmiah yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian sejarah (MPS). Ilmu sejarah merupakan salah satu ilmu pengetahuan tentang manusia dengan beberapa ciri yang amat khas terkait dengan masa lampau kehidupan manusia yang ingin diketahui dan dimengerti oleh manusia itu sendiri. Bahan atau sumbernya dapat menggunakan data-data tinggalan masa lampau manusia yang ingin diteliti dengan kesaksian pelaku sejarah, benda, rumah, tempat ibadah, karya seni terutama tulisan-tulisan arsip.¹⁶ Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo menjelaskan bahwa penggunaan metode penelitian sejarah ada berbagai tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian sejarah, tahapan yang harus dilewati oleh penulis yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.¹⁷

¹⁵ Masmuni Mahatma “Paradigma Politik Nahdhatul Ulama (NU) dalam Bernegara,” MAWA’IZH; Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, *STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik*, Vol. 8, No. 1, (Mei 2017), p. 48-49

¹⁶ Muhamad Shoheh “Membingkai Kajian Historis dan Filologis Dalam Penelitian Ilmiah,” TAZKIYA; Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2015), p. 149

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2013), p. 69

Keempat tahapan metode penelitian sejarah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahapan Heuristik

Tahap Heuristik merupakan tahapan pengumpulan data sebanyak-banyaknya sumber sejarah yang relevan dengan tulisan yang akan dikaji. Sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengumpulan data baik itu dari buku, dokumen tertulis, jurnal, makalah, koran yang nantinya digunakan untuk dalam pengolahan data merekonstruksi sejarah.¹⁸

Pada tahap ini penulis menggunakan Studi Pustaka yang melakukan kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah data-data penting yang akan dibahas oleh penulis dan juga sebagai kemampuan mengakses literatur yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti.¹⁹

Adapun sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk menjadi

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 55

¹⁹ Nyoman Kutha Rama, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 279.

rujukan dan pemilihan akses sebagai berikut; *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Mansur Amin, 1996. *Khazanah Aswaja*, Tim Aswaja Center PWNJ Jawa Timur diketuai oleh KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I, 2016. *Peran Kiai pesantren dalam Partai Politik*, Fathoni Ahmad, 2007. *KH. Hasyim Asy'ari Memodernisasi NU dan Pendidikan Islam*, M. Noor Rohinah, 2010. *Dilema NU di tengah badai pragmatisme politik*, Faisal Ismail, 2004. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Kuntowijoyo 2013. *NU Vis-a-vis Negara*, Feillard Andree, 2017. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Katjung Marijan, 1992. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Greg Fealy, 2011. *Paradigma Politik Nahdhatul Ulama (NU) dalam Bernegara*, Masmuni Mahatma, MAWA'IZH; Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, *STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik* , Vol. 8, No. 1, 2017. *Nahdhatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili, 2010. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Abdurrahman Wahid, 2001. *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*, Arief Mudatsir Mandan, 2008.

2. Tahapan Kritik

Tahapan Kritik merupakan suatu kegiatan untuk mengkritik sumber sejarah, baik

kritik secara internal maupun eksternal dalam upaya mendapatkan keotentikan dan kredibilitas sumber. Kritik internal merupakan kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap kredibilitas isi sumber dengan melihat dan menyelidiki bahan dan dokumen sejarah yang telah dikumpulkan oleh penulis. Sedangkan kritik eksternal merupakan kegiatan penelitian untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah.²⁰

Dalam tahap kritik penulis juga menggunakan metodologi penelitian sejarah guna mendapatkan suatu keobjektivitasan dalam sebuah peristiwa.²¹ Pada tahapan ini penulis juga dapat membuktikan bahwa data-data dan informasi yang dapat mendukung terhadap pembahasan pokok yang diketahui oleh penulis dalam penelitian sejarah. Sehingga dapat dijadikan suatu perbandingan diantara beberapa sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis.

3. Tahapan Interpretasi

Fakta dan informasi yang sudah diketahui dan divalidasi dalam penulisan sejarah harus diinterpretasikan. Hal ini sifatnya

²⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), p. 51

²¹ Suhartono, W Pranoto, *Teori dan Metodologi sejarah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), p. 35

pribadi (individual) siapa saja bisa menafsirkan fakta-fakta yang telah divalidasi.²² Sehingga dalam tahapan interpretasi dapat ditetapkan bahwa fakta-fakta yang berkesinambungan dalam pembahasan pokok dijadikan sebagai landasan untuk merekomendasikan peristiwa masa lalu kedalam konteks yang dapat dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis dan serasi dengan pembahasan.

4. Tahapan Historiografi

Tahapan yang terakhir dalam metodologi penelitian sejarah yaitu tahap penulisan sejarah. Tahap historiografi merupakan suatu aspek dalam penulisan sesuai kronologi yang terjadi. Hal ini memang sangatlah penting dengan memerlukan keterangan hari, tanggal, bulan, tahun dan kronologi yang berurutan dari awal sampai akhir. Dalam tahapan historiografi juga diperlukan kemampuan khusus dalam menulis dan menyusun kronologi dari fakta-fakta sejarah yang valid dan memiliki sifat pragmatis, sebelum menjadi satu kesatuan yang utuh untuk disajikan secara sistematis dan komunikatif dapat dipahami oleh para pembaca.²³ Pada tahap historiografi ini penulis berusaha dengan

²² Suhartono, W pranoto, *Teori dan Metodologi*, p. 55

²³ Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009), p. 150-151

selalu memperhatikan proses kronologis sejarah yang bersifat deskriptif.

Demikian empat tahapan dalam metodologi penelitian sejarah yang penulis lakukan. Dengan melihat tahapan-tahapan tersebut tidak mengherankan bagi sejarawan bahwa kinerja sejarawan untuk mendapatkan hasil sebuah karya ilmiah yang lebih mendekati pada kronologi peristiwa sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab. Setiap bab terbagi kedalam sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *Pertama* : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua* : Kondisi Nahdhatul Ulama Sebelum Tahun 1952 yang meliputi, Kiprah dan Pandangan Keagamaan Nahdhatul Ulama, Kiprah Nahdhatul Ulama di Bidang Sosial, dan Kiprah, Pandangan dan Sikap Politik Nahdhatul Ulama.

Bab *Ketiga* : Faktor Transformasi Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik yang meliputi, Faktor

Internal, Faktor Eksternal, dan Keluarnya Nahdhatul Ulama dari Partai Masyumi.

Bab *Keempat* : Transformasi Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik Di Indonesia yang meliputi, Latar Belakang Nahdhatul Ulama Menjadi Partai Politik di Indonesia, Pengaruh Nahdhatul Ulama sebagai Partai Politik Indonesia terhadap Bangsa, dan Nilai-nilai Nahdhatul Ulama yang diterapkan sebagai Partai Politik.

Bab *Kelima* : Penutup yang meliputi, Kesimpulan dan Saran.